

ABSTRAK

Perubahan dari basis akuntansi kas menjadi basis akuntansi akrual diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. PP 71 Tahun 2010 mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan basis akrual paling lambat tahun 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual dalam aspek Laporan Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Teknologi Informasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumentasi dengan pimpinan dan pegawai dari sub bagian keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan Dinas Kehutanan mulai menerapkan SAP Akrual untuk tahun anggaran 2015. Kendala yang dihadapi yaitu kurangnya persiapan waktu, aplikasi sering mengalami *error*, sebagian staff mengalami kesulitan. Pada periode 2016-2017 Pembinaan dan pengembangan SDM terkait SAP Akrual dilakukan secara intens. Perbaikan bertahap juga dilakukan pada aspek Teknologi Informasi sehingga aplikasi lebih stabil dan penyusunan laporan keuangan menjadi lebih akurat.

Kata Kunci: Standar Akuntansi Pemerintahan, Basis Akrual, PP No. 71 Tahun 2010, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.

ABSTRACT

Changes from the cash-based accounting to accrual accounting are expected to increase transparency and accountability in financial management of the Regional Government. Government Regulation No. 71 of 2010 requires the Regional Government to implement the accrual basis no later than 2015. The purpose of this study is to understand and analyze the application of accrual-based Government Accounting Standards in aspects of Financial Statements, Human Resources, and Information Technology. The data collection technique was carried out by interview and documentary studies with leaders and employees of the financial sub-section of the East Java Provincial Forestry Service. The results showed that the East Java Provincial Forestry Service began to implement Accrual-based Accounting Standards for the 2015 fiscal year. Constraints faced were lack of time preparation, frequent application errors, some staff experiencing difficulties. In the period of 2016-2017 the development and development of Government Accounting Standards related Accrual HR was carried out intensely. Gradual improvements are made on Information Technology aspect so that applications are more stable and the preparation of financial statements is more accurate.

Keywords: Government Accounting Standards, Accrual Basis, Government Regulation No. 71 of 2010, East Java Provincial Forestry Service.